

# 2022

## EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG 2005 – 2025 KABUPATEN PESISIR SELATAN



Disusun Oleh:  
**BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Berkerjasama Dengan:  
**UNIVERSITAS ANDALAS PADANG**



# EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG 2005 – 2025 KABUPATEN PESISIR SELATAN

## TIM PENYUSUN:

HADI SUSILO, S.STP, M.Si  
Drs. ADRI, M.Si  
AHMAD HIDAYAT, S.STP, M.Sc  
RUDI ANWAR, ST  
MARDONI, SE, M.Si  
BENNY ROKMANSYAH. A, S.Pt  
DONNY TAYES, SKM, M.Si  
FEBRIADI, SS  
HARRISON TAR, S.Pi, M.Si  
ABDUL HAMID, SP  
WERY ESRA VELNI, SE, Ak  
ANDI ASMARA, S.T  
NOFENDRI, S.Si, M.Si, M.I.L  
FERA EZA SAFITRI, S.E, M.Si  
SOVIA DEWI, S.E, M.Si  
LUCYA LIDYA SARI, S.P  
SURYATMONO, S.Si  
DEDI JUNAEDI, SAP  
RIFTOMI, ST  
DEASY ITRAVIA, SE  
YULITA BUSRALI, SE., MM  
HANIFAH ASZA, S.P.W.K

## TIM ASISTENSI:

Prof. Dr. Ir. MELINDA NOER, M.Sc  
YUERLITA, S.Si., M.Si., Ph. D



**KABUPATEN PESISIR SELATAN  
2022**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah swt, atas berkat rahmat dan karunia Nya dokumen Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025 Kabupaten Pesisir Selatan dapat diselesaikan. Evaluasi ini merupakan evaluasi tahap akhir pelaksanaan RPJPD yang akan berakhir dalam 3 tahun yang akan datang. Pelaksanaan RPJPD berakhir bersamaan dengan berakhirnya implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 Kabupaten Pesisir Selatan tahap IV.

Dengan selesainya dokumen evaluasi RPJP ini, diharapkan akan dapat menjadi pedoman dalam penyiapan RPJPD tahap berikutnya bagi pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk menyusun rencana pembangunan daerah dua puluh tahun yang akan datang. Saran dan kritik membangun demi kesempurnaan hasil evaluasi dan melengkapi bahan pertimbangan dalam penyusunan RPJPD kedepan sangatlah diharapkan.

Kepada Tenaga Ahli dari Universitas Andalas ibu Prof. Dr. Ir. Melinda Noer, M.Sc. dan ibu Yuerlita, M.Si., Ph.D diucapkan terimakasih atas bantuan dan fasilitasnya dalam diskusi selama penyusunan dokumen evaluasi ini. Semoga dokumen ini bermanfaat dalam merencanakan kemajuan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan di masa datang.

Painan, 18 Desember 2022  
Bapedalithang Kabupaten Pesisir Selatan  
Kepala,



**HADI SUSILO, S.STP., M.Si**  
Nip. 19770522 199703 1 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tujuan.....	1
1.3. Dasar Hukum .....	2
1.4. Luaran .....	2
1.5. Manfaat.....	2
<b>II. KERANGKA EVALUASI.....</b>	<b>3</b>
<b>III. METODA .....</b>	<b>7</b>
3.1. Pendekatan .....	7
3.2. Tahapan.....	7
3.3. Lingkup Kegiatan .....	8
<b>IV. HASIL EVALUASI.....</b>	<b>9</b>
4.1. Evaluasi Dokumen RPJP 2005-2025 .....	9
4.2. Evaluasi Kinerja Pelaksanaan RPJP 2005-2025.....	17
<b>V. PENUTUP.....</b>	<b>42</b>

## DAFTAR TABEL

### Tabel

### Halaman

1. Evaluasi Dokumen RPJPD berdasarkan Kesesuaian Materi dengan RTRW dan Visi Misi Pembangunan 2005 – 2025 Kabupaten Pesisir Selatan.....	9
2. Persandingan Sistematika Penyajian Dokumen RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan dengan yang diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 .....	12
3. Evaluasi Sistematika dan Materi RPJP Kabupaten Pesisir Selatan 2005 - 2025	14
4. Analisis Arah dan Pentahapan RPJP Kabupaten Pesisir Selatan 2005-2025.....	19
5. Evaluasi Hasil RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan 2005-2025 .....	34
6. Hasil Evaluasi terhadap RPJP Kabupaten Pesisir Selatan 2005-2025 .....	39

## DAFTAR GAMBAR

### Gambar

### Halaman

1. Tahapan Tema Pembangunan dua Puluh Tahunan .....	5
2. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang .....	6
3. Sistematisa keterkaitan Visi, Misi dan Arah kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Pesisir Selatan 2005-2025 .....	18

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang untuk setiap Kabupaten dan Kota diamanatkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, bahwa setiap lima tahun sekali RPJP dievaluasi agar tetap mencapai tujuannya. Evaluasi pada periode akhir RPJP yaitu pada saat pelaksanaan RPJMD periode ke empat, maka tujuannya tentu bukan lagi untuk tindakan perbaikan dan perubahan RPJP melainkan sebagai bahan bagi penyusunan RPJPD untuk periode berikutnya. Evaluasi RPJPD yang merekomendasikan perubahan RPJPD hanya dapat dilakukan sebelum 7 tahun RPJPD akan berakhir. Sementara evaluasi yang dilakukan saat ini adalah dalam 3 tahun akan berakhir. Hasil evaluasi RPJPD kabupaten dilaporkan oleh kepada Bappeda kepada Bupati, dan selanjutnya diteruskan kepada Gubernur melalui kepada Bappeda Provinsi.

Urgensi evaluasi RPJPD adalah untuk melihat kesesuaian rencana pembangunan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW), kejelasan arah pembangunan dan mengukur keberhasilan upaya –upaya untuk mewujudkan misi. Hasil evaluasi RPJPD ini diutamakan untuk pedoman dan pertimbangan dalam penyusunan RPJPD berikutnya.

### 1.2. Tujuan

Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025 Kabupaten Pesisir Selatan bertujuan untuk:

- a. Menganalisis kinerja RPJPD periode 2005-2025 Kabupaten Pesisir Selatan

- b. Menyediakan informasi untuk penyusunan RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan berikutnya

### **1.3. Dasar Hukum**

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- c. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/ 09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025

### **1.4. Luaran**

Luaran dari evaluasi ini adalah tersedianya dokumen hasil evaluasi RPJPD 2005-2025 Kabupaten Pesisir Selatan.

### **1.5. Manfaat**

Diharapkan hasil evaluasi ini bermanfaat sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk pembangunan daerah dua puluh kedepan (RPJPD tahap selanjutnya).

## II. KERANGKA EVALUASI

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan:

- a. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan Daerah;
- b. Relevansi antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- c. Konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
- d. Konsistensi antara Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; dan
- e. Kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang dilakukan pada masa periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terakhir merupakan jenis evaluasi akhir yang dilaksanakan terhadap hasil rencana pembangunan jangka panjang daerah. Evaluasi terhadap hasil RPJPD lingkup Daerah kabupaten/kota sebagaimana diamanahkan peraturan perundangan, Permendagri Nomor 86 tahun 2017, mencakup evaluasi terhadap sasaran pokok, arah kebijakan dan penahapan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah. Evaluasi dimaksud dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJPD lingkup Daerah kabupaten/kota.

Penilaian tersebut digunakan untuk mengetahui:

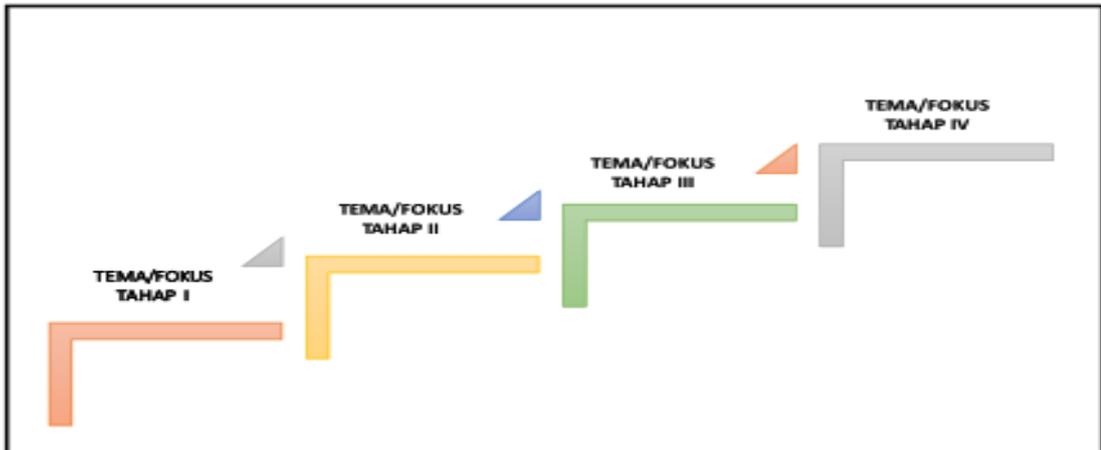
- a. Realisasi antara sasaran pokok arah kebijakan penahapan RPJPD kabupaten/kota dengan capaian sasaran RPJMD kabupaten/kota; dan
- b. Realisasi antara capaian sasaran pokok arah kebijakan penahapan RPJPD kabupaten/kota dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah provinsi.

Selain itu, evaluasi juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa visi, misi dan sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten telah berkontribusi dan dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang provinsi.

Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang, maka ditetapkan tahapan lima tahunan (empat RPJMD). Empat tahapan RPJMD yang dimaksud berhirarki agar setiap tahapan menjadi prasyarat untuk mencapai tahap yang lebih tinggi, sampai visi terwujud pada tahap IV RPJMD selama periode 20 tahun jangka panjang.

Setiap fokus tahapan RPJMD diterjemahkan ke dalam visi yang sesuai dengan fokusnya. Visi kemudian diuraikan ke dalam misi – misi untuk mewujudkan visi. Secara logis maka setiap misi ditetapkan strategi dan arah kebijakan yang akan memungkinkan misi dapat dicapai tujuannya. Gambar 1 memperlihatkan tahapan RPJPD berdasarkan fokus yang dibagi ke dalam periode RPJMD.

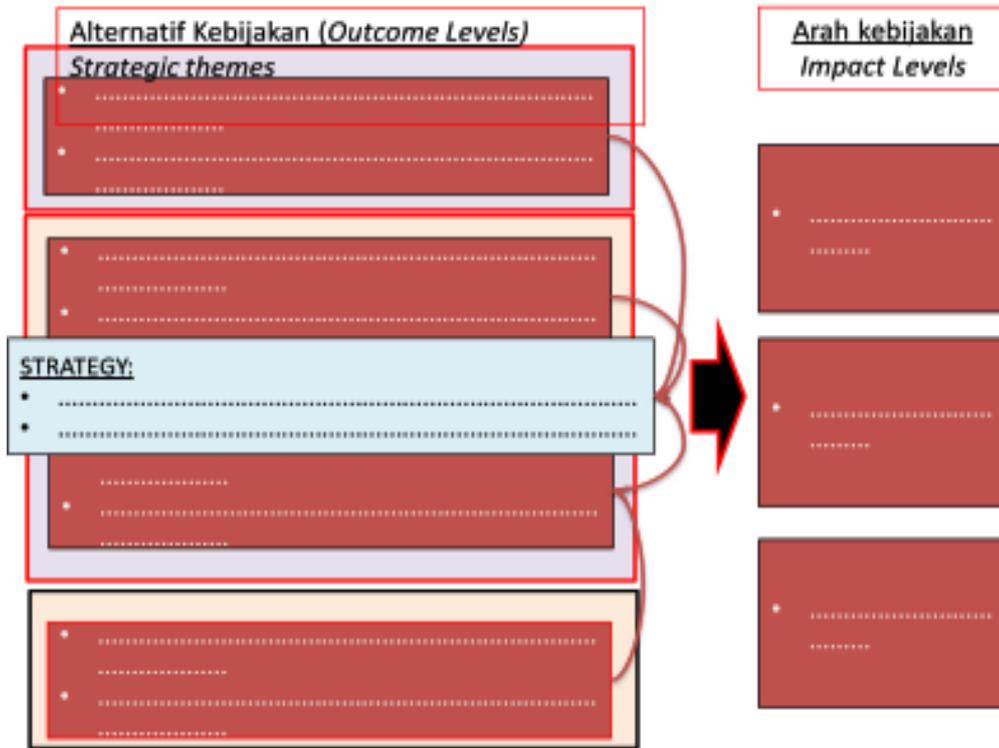
### Tema/Fokus Pembangunan dua puluh tahunan



Gambar 1. Tahapan Tema Pembangunan dua Puluh Tahunan

Gambar 2 memperlihatkan bagaimana hubungan strategi dan arah kebijakan yang perlu dibangun agar misi dapat direalisasikan dan mencapai tujuan guna mewujudkan visi pembangunan untuk setiap tahap RPJMD.

Goal (Sasaran): \_\_\_\_\_



Gambar 2. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang

### III. METODA

#### 3.1. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam melakukan evaluasi RPJPD 2005-2025 Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

- Pendekatan objektif:

Evaluasi RPJP secara objektif menggunakan standar dan aturan yang berlaku, serta perbandingan dengan aturan yang ada. Evaluasi dilakukan terhadap struktur dan isi dokumen, serta capaian kinerja RPJP sesuai target yang ditetapkan. Data diperoleh dari OPD terkait dan dibahas dalam pertemuan berupa diskusi kelompok terarah (Focused Group Discussion / FGD).

- Pendekatan subjektif:

Evaluasi RPJPD juga menggunakan pendekatan subjektif, yakni memperhatikan tata kerja penyusunan dokumen dan penetapan target RPJPD tahun 2005-2026. Faktor yang mempengaruhinya antara lain adalah kualitas sumberdaya yang tersedia. Target yang tidak tercapai maupun capaian yang melewati target pada tahun 2021 dan 2022 diidentifikasi dan dianalisis untuk diidentifikasi penyebabnya. Tujuannya agar target program yang harus dicapai diakhir RPJPD yakni tahun 2025 masih dapat diperbaiki kinerjanya

- Asumsi-asumsi tertentu.

Selain menggunakan pendekatan objektif dan subjektif, evaluasi RPJPD 2005-2025 juga memperhatikan kondisi keuangan daerah, implementasi dan hasil intervensi program yang sedang berlangsung selama RPJMD terakhir (Tahap IV) yang akan berlangsung sampai tahun 2026.

#### 3.2. Tahapan

Pelaksanaan evaluasi RPJPD didahului dengan mereview struktur dan isi RPJPD 2005 – 2025 dan membandingkannya dengan peraturan

perundangan yang berlaku, sebagaimana diatur Permendagri No. 86 tahun 2017. Selanjutnya evaluasi dilakukan terhadap indikator kinerja yang ditetapkan, membandingkan target dengan capaiannya, melihat hasil – hasil capaian dari RPJMD tahap I sampai tahap IV terhadap indikator tersebut. Tahapan kerja evaluasi RPJPD 2005-2026 Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

- Mereview umum dan materi Bab per Bab dokumen RPJPD 2005 – 2025 Kabupaten Pesisir Selatan
- Menganalisis kinerja pelaksanaan RPJPD melalui indikator yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama
- Menyusun rekomendasi sebagai hasil analisis
- Penutup

### **3.3. Lingkup Kegiatan**

- a. Evaluasi RPJPD bab per bab dan menyandingkan muatannya dengan peraturan perundangan berlaku, yakni Kemendagri No.86 tahun 2017.
- b. Diskusi Kelompok Terarah (FGD) dengan stakeholders (OPD Terkait) difasilitasi Tim Pelaksana Kerja Evaluasi RPJPD, Bidang Penelitian Bapelitbangda Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. Menyusun rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi.

## IV. HASIL EVALUASI

### 4.1. Evaluasi Dokumen RPJP 2005-2025

RPJPD 2005-2025 Kabupaten Pesisir Selatan disahkan dengan Peraturan Daerah Nomor Nomor 8 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025. Namun tidak ditemukan penjelasan di dalam dokumen mengapa RPJPD yang disusun dan efektif digunakan mulai tahun 2005 tetapi disahkan dengan peraturan daerah pada tahun 2010. Data yang digunakan bahkan ada tahun 2009 (lihat Tabel 2.14 dokumen RPJPD).

Evaluasi RPJPD dimulai dengan melakukan review terhadap dokumen RPJPD berdasarkan kriteria kesesuaian RPJPD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam hal pola ruang dan struktur ruang, visi dan misi pembangunan yang ditetapkan.

Tabel 1. Evaluasi Dokumen RPJPD berdasarkan Kesesuaian Materi dengan RTRW dan Visi Misi Pembangunan 2005 – 2025 Kabupaten Pesisir Selatan

<b>Fokus</b>	<b>Uraian</b>	<b>Indikator</b>	<b>Hasil Evaluasi</b>
Kesesuaian dengan RTRW (penelaahan RTRW)	arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPD selaras dengan arah kebijakan RTRW	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Struktur ruang</li> <li>• Pola ruang</li> <li>• Indikasi program pemanfaatan ruang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Secara umum perencanaan pembangunan jangka panjang menggunakan perencanaan berbasis spasial dalam merencanakan pembangunan fisik dan lingkungan, namun belum memuatnya dalam indikator yang terukur.</li> </ul>

Fokus	Uraian	Indikator	Hasil Evaluasi
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• pembangunan kawasan dan pembangunan infrastruktur jalan yang tertuang dalam pembangunan jangka panjang belum didukung data dari RTRW.</li> <li>• Secara eksplisit dinyatakan bahwa bahwa RPJPD terkait dengan RTRW, namun ditemukan pernyataan bahwa "keinginan untuk pemekaran kabupaten Pesisir Selatan menjadi 2 atau 3 kabupaten dapat dituangkan dalam konsep RTRW" (halaman 24). Artinya belum ada pedoman dari RTRW yang dirujuk RPJPD.</li> </ul>
Visi	Arah pembangunan yang jelas "Pesisir Selatan Daerah Maju, Sejahtera Dengan Basis Ekonomi Pangan dan Pariwisata"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah menjawab permasalahan pembangunan atau isu strategis</li> <li>• Mengakomodasi peluang dan kekuatan serta keunikan kompetitif daerah</li> <li>• Menggambarkan nilai kunci lokal (<i>core values</i>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permasalahan pembangunan dan isu strategis belum didukung dengan data yang cukup bahwa secara spesifik pembangunan daerah Pesisir Selatan penting untuk diarahkan kepada</li> </ul>

Fokus	Uraian	Indikator	Hasil Evaluasi
Misi	Upaya-upaya yang jelas untuk mewujudkan visi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperhatikan faktor, lingkungan strategis eksternal dan internal daerah</li> <li>• Bahasa yang ringkas , sederhana dan mudah diingat</li> </ul>	<p>kesejahteraan dengan berbasis pangan dan pariwisata. Data pariwisata yang disajikan hanya data jumlah objek wisata, jumlah pengunjung.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Misi yang dituangkan cukup baik, walaupun didominasi faktor lingkungan internal daerah dan belum menunjukkan keinginan untuk menangkap peluang dan mengatasi tantangan faktor lingkungan eksternal.</li> </ul>

Dari susunan penyajian unsur dan materi RPJPD 2005-2025 Kabupaten Pesisir Selatan, terlihat bahwa:

- semua unsur dan materi kelengkapan dokumen RPJPD, telah tertuang dan telah dipenuhi RPJPD ini. Namun demikian, belum semua unsur didukung data yang relevan dan isian materi untuk penetapan isu strategis dinilai masih dangkal karena belum didukung dengan penyajian data pada Bab II.
- Indikator untuk menguji capaian target pembangunan di akhir tahun 2025 juga belum didukung dengan metoda analisis yang jelas.

- Tidak ada penjabaran misi ke dalam sasaran pokok yang seharusnya diperlukan untuk menguji dan menjamin bahwa misi akan dapat dicapai.
- Misi langsung diturunkan kepada arah kebijakan untuk setiap tahapan RPJMD. Perlu penjelasan mengapa RPJMD periode pertama tidak termasuk kedalam tabel tahapan RPJPD.

Berikut disandingkan sistematika penyajian dokumen RPJPD sesuai peraturan perundangan yang berlaku, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (lihat Tabel 2).

Tabel 2. Persandingan Sistematika Penyajian Dokumen RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan dengan yang diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017

<b>Peraturan Mendagri No. 86 tahun 2017</b>		<b>Perda Kab Pesisir Selatan No 8 tahun 2010</b>	
Bab I. Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Latar belakang</li> <li>2. Dasar Hukum Penyusunan</li> <li>3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan dokumen rencana pembangunan lainnya</li> <li>4. Maksud dan tujuan</li> <li>5. Sistematika Penulisan</li> </ol>	Bab I. Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengantar</li> <li>2. Latar belakang</li> <li>3. Proses Penyusunan RPJPD</li> <li>4. Pengertian</li> <li>5. Maksud dan Tujuan</li> <li>6. Landasan Hukum</li> <li>7. Hubungan RPJPD dengan Dokumen perencanaan yang lain</li> <li>8. Sistematika</li> </ol>

<b>Peraturan Mendagri No. 86 tahun 2017</b>		<b>Perda Kab Pesisir Selatan No 8 tahun 2010</b>	
Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah	Gambaran Umum Kondisi Daerah	Bab II. Kondisi Umum dan Analisis Isu Strategis	1. Kondisi Umum 2. Analisis isu Strategis
Bab III. Permasalahan dan Isu strategis Daerah	1. Permasalahan Pembangunan Daerah 2. Isu Strategis	Bab III. Visi dan Misi	1. Visi 2. Misi
Bab IV. Visi dan Misi Daerah	1. Visi 2. Misi	Bab IV. Arah kebijakan, Pentahapan Pembangunan Daerah dan Kaidah Pelaksanaan	1. Arah kebijakan Pembangunan Daerah 2. Tahapan pembangunan Daerah 3. Kaidah Pelaksanaan
Bab V. Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah	1. Arah Kebijakan Daerah 2. Sasaran pokok	Bab V. Penutup	
Bab VI. Penutup			

Dari sisi penyajian, sistematika penyajian dokumen RPJPD mulai dari rancangan awal sampai dengan rancangan akhir RPJPD tidak ada perbedaan, terdiri dari pendahuluan, gambaran umum kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran daerah, arah kebijakan dan sasaran pokok serta penutup. Namun, sistematika dokumen RPJPD 2005-2025 Kabupaten Pesisir Selatan ternyata tidak sepenuhnya memenuhi pengaturan penulisan dokumen sebagaimana tersebut di atas. Beberapa materi terlihat telah diakomodir, tetapi dimuat dalam Bab yang berbeda.

Secara rinci hasil evaluasi terhadap sistematika dan isian materi RPJP disajikan Tabel 3.

Tabel 3. Evaluasi Sistematika dan Materi RPJP Kabupaten Pesisir Selatan 2005 - 2025

No	Bab	Substansi menurut Permendagri No. 86 tahun 2017	Hasil evaluasi RPJPD 2005-2025 Kab. Pesisir selatan
I	PENDAHULUAN		
a.	Pengantar	-	Dapat disatukan dalam satu sub Bab, yakni Latar Belakang
b	Latar belakang	Menjelaskan pengertian ringkas tentang RPJPD, proses penyusunan RPJPD, alasan mengapa RPJPD ini disusun, resiko jika RPJPD tidak tersedia dan pendekatan yang digunakan dalam penyusunan	
c	Proses Penyusunan RPJPD		
d	Pengertian		
e	Maksud dan Tujuan	Memberikan uraian ringkas tentang maksud penyusunan dokumen RPJPD dan tujuan penyusunan dokumen RPJPD bagi daerah yang bersangkutan	v
f	Landasan Hukum	menjelaskan dasar hukum perencanaan pembangunan daerah pada umumnya dan RPJPD pada khususnya sesuai peraturan perundangan dan produk hukum daerah terkait	v
g	Hubungan RPJPD dengan Dokumen perencanaan yang lain	menjelaskan hubungan RPJPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJPN, RPJPD provinsi, RTRW nasional, RTRW provinsi, dan RTRW kabupaten/kota	Ditulis bahwa ada hubungan dengan dokumen perencanaan yang lain, tetapi tidak menjelaskan bentuk hubungan
h	Sistematika	Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RPJPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya	v
II	KONDISI UMUM DAN ANALISIS ISU STRATEGIS		

No	Bab	Substansi menurut Permendagri No. 86 tahun 2017	Hasil evaluasi RPJPD 2005-2025 Kab. Pesisir selatan
	a	Kondisi Umum menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Terdiri dari: – aspek Geografi dan Demografi, – aspek kesejahteraan masyarakat – aspek pelayanan umum – aspek daya saing daerah	– Menyajikan gambaran umum daerah, namun belum didukung hasil analisis berdasarkan data dan sumber yang jelas. Contoh: Jika dalam 20 tahun terjadi peningkatan penduduk sebesar 25 persen, tentunya juga akan terjadi pengalihan lahan sebesar itu (hal 9, tantangan demografi). – Belum memuat semua aspek sebagaimana diatur Permendagri tsb, khususnya aspek daya saing daerah.
	b	Analisis isu Strategis menjelaskan butir-butir penting permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam pembangunan daerah untuk waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang, terdiri dari: - permasalahan pembangunan - isu strategis	– Seharusnya dibuat pada bab tersendiri, yakni Bab III. – Isu strategis yang dimunculkan belum berdasarkan analisis permasalahan pembangunan
III	VISI DAN MISI		
	a	Visi uraian yang jelas tentang apa dan bagaimana visi yang ingin diwujudkan tersebut pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang daerah	v

No	Bab	Substansi menurut Permendagri No. 86 tahun 2017	Hasil evaluasi RPJPD 2005-2025 Kab. Pesisir selatan	
	b	Misi	rumusan tentang bagaimana visi diwujudkan dan di sisi lain sebagai komitmen terhadap keseluruhan stakeholders utama pelaku pembangunan daerah	v
IV	ARAH KEBIJAKAN, PENTAHAPAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN KAIDAH PELAKSANAAN			
	a	Arah kebijakan Pembangunan Daerah	menjelaskan arah kebijakan pembangunan jangka panjang untuk menjelaskan keterhubungan antara sasaran dengan sasaran pokok dan bagaimana pentahapan pembangunan dilakukan pada tiap lima tahunan selama 4 (empat) periode. Terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Arah kebijakan daerah: pentahapan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok tahapan lima tahunan RPJPD</li> <li>- Sasaran pokok: menjelaskan target dari capaian pembangunan jangka panjang pada akhir tahun ke-20.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seharusnya RPJPD menyajikan arah kebijakan sesuai tahapan empat periode RPJMD secara lengkap untuk menunjukkan hirarki / tangga dalam rangka mencapai visi</li> <li>- Tidak ada sasaran pokok untuk mengukur dan menjamin arah kebijakan tercapai.</li> </ul>
	b	Tahapan pembangunan Daerah		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seharusnya sudah dimuat penetapan arah kebijakan</li> <li>- Perlu penjelasan mengapa tahapan RPJMD dimulai tahun 2020, tidak tahun 2005.</li> </ul>
	c	Kaidah Pelaksanaan	-	v
V	PENUTUP			v

## 4.2. Evaluasi Kinerja Pelaksanaan RPJP 2005-2025

Evaluasi kinerja pelaksanaan RPJP dimulai dengan menganalisis hubungan kinerja Misi dengan semua strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan untuk setiap tahapan RPJMD yang mengisi RPJPD. Namun karena yang disajikan dalam RPJPD ini hanya arah kebijakan, maka disajikan hasil evaluasi Misi terhadap Arah kebijakan RPJMD tahap 2, 3 dan 4.

Lima Misi pembangunan daerah dalam RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan 2005-2025 adalah:

- a. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih yang berorientasi pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- b. Mengembangkan dan memperkuat industri pangan berbasis keunggulan lokal yang dalam perkembangannya bersinergi dengan pertumbuhan pariwisata daerah.
- c. Mewujudkan pelayanan pendidikan dan kesehatan berkualitas dalam rangka membangun sumberdaya insani yang memiliki daya saing tinggi
- d. Mengembangkan nilai-nilai agama, adat dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat
- e. Pengendalian bencana dan mempertahankan kelestarian lingkungan

Selanjutnya Misi tersebut diturunkan kepada arah kebijakan sebagaimana Gambar 3 yang menyajikan hubungan visi, misi, dan arah kebijakan RPJP Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2005-2025.



Gambar 3. Sistematis keterkaitan Visi, Misi dan Arah kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Pesisir Selatan 2005-2025

Misi RPJP dan arah kebijakan setiap tahap RPJMD selanjutnya, sebagaimana disajikan dan dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Analisis Arah dan Pentahapan RPJP Kabupaten Pesisir Selatan 2005-2025

No.	Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah	RPJM Ke-2 (2011-2015)	RPJM Ke-3 (2016-2020)	RPJM Ke - 4 (2021-2025)	Analisis
	<b>Era</b>	Era persiapan Pengembangan ekonomi pangan dan pariwisata	Era Menumbuh-kembangkan Industri Pangan berbasis keunggulan lokal dengan strategi Proteksi Daerah bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Era persiapan industri pangan lokal yang berdaya saing nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>Era dibuat cukup konsisten, yakni sektor pangan dan industri pangan</li> <li>Namun Era belum memperlihatkan sekuensi yang bertahap. Era persiapan industri pangan diletakkan pada tahap akhir, sementara menumbuh-kembangkan industri berada pada tahapan sebelumnya</li> </ul>
A.	<b>Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih</b>				
1	Terbangunnya Sinergitas Antara pelaku Pembangunan	Terlaksananya keterpaduan program dan kegiatan antara SKPD yang telah ada.	Meningkatnya koordinasi pengelolaan program antar SKPD	Mantapnya koordinasi pelaksanaan program SKPD	<ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk terbangunnya sinergi antar pelaku pembangunan, sekuensi pentahapan penting diperhatikan.</li> <li>Koordinasi yang baik antar pelaku pembangunan adalah prasyarat untuk terlaksananya</li> </ul>
		Terbangunnya kemitraan yang baik antara eksekutif dan legislatif	Meningkatnya kemitraan antara pemerintah dan masyarakat	Meningkatnya kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat	

No.	Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah	RPJM Ke-2 (2011-2015)	RPJM Ke-3 (2016-2020)	RPJM Ke - 4 (2021-2025)	Analisis
		Terjalannya kerjasama pembangunan dengan wilayah perbatasan	Meningkatnya koordinasi pembangunan dengan wilayah perbatasan	Meningkatnya kemitraan usaha di wilayah perbatasan	keterpaduan program dan kemitraan
2	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah yang Baik, Partisipatif, Transparan dan Akuntabel	Terwujudnya organisasi restrukturisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien	Terwujudnya kualitas aparatur yang lebih profesional	Penerapan teknologi informasi dalam sistem birokrasi daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah yang Baik, Partisipatif, Transparan dan Akuntabel dibutuhkan teknologi dan sistem informasi yang handal, terlalu terlambat apabila diletakkan ada tahap akhir RJPP</li> </ul>
Terlaksananya reorganisasi birokrasi daerah sesuai kebijakan nasional	Terwujudnya kualitas aparatur yang lebih profesional	Memantapkan penerapan Teknologi Informasi dalam sistem birokrasi			
Terlaksananya keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan	Terwujudnya sistem perencanaan dan penganggaran partisipatif	Memantapkan peran serta masyarakat dalam perumusan kebijakan			
3	Terwujudnya Fungsi Pelayanan Publik yang Prima	Terwujudnya sistem pelayanan terpadu yang semakin efisien dan efektif	Terwujudnya sistem pelayanan terpadu yang terukur, tepat waktu, tepat biaya dan nyaman	Penerapan teknologi informasi dalam pelayanan terpadu	Pelayanan Publik yang Prima akan terwujud apabila didukung dengan sistem informasi yang baik berbasis teknologi. Maka tahap pertama

No.	Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah	RPJM Ke-2 (2011-2015)	RPJM Ke-3 (2016-2020)	RPJM Ke - 4 (2021-2025)	Analisis
		Penataan penempatan aparatur sesuai dengan kebutuhan organisasi	Melakukan pelatihan guna peningkatan kapasitas aparatur dalam pelayanan publik	Tersedianya aparatur pelayanan yang berkualitas	yakni terwujudnya sistem pelayanan terpadu yang semakin efisien dan efektif seharusnya adalah tahap akhir RPJP
4	Terlaksananya Penegakan Hukum Berkeadilan dan Demokratis	Terlaksananya pembaharuan produk-produk hukum guna menyesuaikan dengan kondisi masyarakat dan pembangunan	Melakukan pembangunan struktur dan kelembagaan hukum daerah	Memantapkan sistem pemantau kerawanan konflik politik	Terlaksananya Penegakan Hukum Berkeadilan dan Demokratis, berbau hukum positif. Sementara yang diharapkan adalah hukum adat dapat diadopsi kedalam penegakan hukum untuk penyelesaian konflik di masyarakat. Sekuensinya tentu dimulai dari meningkatkan kapasitas lembaga penyelesaian sengketa adat.
		Terdapatnya transformasi budaya Minangkabau ke dalam produk hukum daerah	Melakukan pendidikan dasar hukum bagi fungsionaris adat	Meningkatkan kapasitas lembaga penyelesaian sengketa adat	
<b>B.</b>	<b>Mengembangkan Industri Pangan Berbasis Keunggulan Lokal dan Teknologi Tepat Guna yang Bersinergi dengan Pertumbuhan Pariwisata</b>				
1	Pengembangan Sektor UMKM sebagai Basis Menuju Industri Pangan	Penetapan desa dan pembinaan industri pengolahan berbasis	Penumbuhan industri pangan pada desa-desa binaan	Pengembangan industri pangan secara lebih meluas	

No.	Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah	RPJM Ke-2 (2011-2015)	RPJM Ke-3 (2016-2020)	RPJM Ke - 4 (2021-2025)	Analisis
		sumberdaya lokal			
		Penelitian dan pengembangan produk-produk olahan yang berpotensi dikembangkan dari sumberdaya lokal	Terciptanya produk olahan yang memiliki cita rasa yang berkualitas dan digemari oleh pasar dalam dan luar daerah	Mendorong sebagian pengusaha kecil berkembang menjadi pengusaha kelas menengah	
2	Terwujudnya Kegiatan Jasa Servis yang Efisien	Semakin berkembangnya manajemen usaha bisnis jasa yang telah ada	Meningkatnya kemampuan kewirausahaan yang bersifat profesional.	Terwujudnya kemampuan penggunaan teknologi informasi yang tinggi	Tahapan ini tidak menunjukkan tahapan yang satu dilakukan setelah yang tahapan sebelumnya selesai, melainkan satu tahapan yang akan mewujudkan berkembangnya usaha bisnis.
		Terlaksananya Penataan lokasi Pasar dan pembangunan fasilitas terkait.	Terselenggaranya sistem transportasi daerah yang nyaman dan terintegrasi dengan kegiatan wisata	Terwujudnya manajemen usaha jasa modern dan profesional	Apabila kegiatan jasa servis efisien diharapkan mendukung dan terintegrasi dengan wisata, maka yang dikembangkan adalah ekonomi kreatif bukan hanya bisnis jasa yang telah ada.

No.	Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah	RPJM Ke-2 (2011-2015)	RPJM Ke-3 (2016-2020)	RPJM Ke - 4 (2021-2025)	Analisis
3	Pengembangan Komoditi Lokal sebagai bahan dasar Industri pangan	Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas	20% produksi pertanian dalam arti luas yang dijual telah dilakukan pengolahan	30% produksi pertanian dalam arti luas yang dijual telah dilakukan pengolahan.	
		Pembinaan terhadap petani dan nelayan dalam hal penggunaan teknologi tepat guna	Meningkatnya penguasaan teknologi tepat guna oleh petani dan nelayan	Berkembangnya penguasaan teknologi oleh petani dan nelayan secara lebih masif termasuk sistem informasi	
		Terbangunnya prasarana dan sarana penangkapan, pendaratan dan pendukung operasional penangkapan	Terselesainya prasarana dan sarana penangkapan, pendaratan dan pendukung operasional penangkapan	Terkembangkannya kelembagaan usaha/bisnis penangkapan dan budidaya ikan laut dengan pola kemitraan pemerintah dan swasta dan intensifikasi penangkapan dan budidaya	
		Dihasilkannya SDM yg handal utk mendukung usaha penangkapan dan budidaya ikan laut	Berlanjutnya proses menghasilkan SDM yg handal utk mendukung usaha penangkapan dan budidaya ikan laut	Dihasilkannya SDM yang handal untuk mendukung usaha penangkapan dan budidaya ikan laut	Tahap 4 kembali mengulang tahap 2 yang seharusnya sudah selesai.

No.	Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah	RPJM Ke-2 (2011-2015)	RPJM Ke-3 (2016-2020)	RPJM Ke - 4 (2021-2025)	Analisis
		Pembentukan dan pembinaan terhadap kelembagaan usaha bisnis perikanan	Berkembangnya kelembagaan usaha bisnis penangkapan dan budidaya ikan laut dengan pola kemitraan	Meningkatnya kemampuan kelembagaan usaha bisnis penangkapan dan budidaya ikan laut	Meningkatnya kemampuan kelembagaan seharusnya menjadi syarat untuk berkembangnya kelembagaan usaha bisnis
4	Pengembangan Sistem Pertanian yang Lebih Modern dan Berbasis Agrobisnis	Terlaksananya secara penuh penyuluhan dan bimbingan teknis untuk usaha pertanian rakyat. secara merata.	Meningkatnya kualitas SDM pelaku usaha pertanian rakyat melalui penyuluhan dan bimbingan teknis.	Diterapkannya teknologi pertanian tepat guna pada kawasan-kawasan potensial	Pengembangan Sistem Pertanian yang Lebih Modern dan Berbasis Agrobisnis perlu didukung dengan pengembangan agroindustri yang sekaligus akan berkontribusi pada pengembangan pariwisata sesuai era yang diharapkan
		Pembangunan kawasan strategis secara lebih terintegrasi	Terciptanya keterlibatan setiap sektor dalam pembangunan kawasan strategis	Terbangunnya 5 kawasan strategis dalam menopang perekonomian masyarakat Pesisir Selatan	
5	Terwujudnya Pesisir Selatan Sebagai Daerah Tujuan Wisata Utama di Sumatera Barat	Pembangunan Kawasan Carocok Painan dan melengkapi prasarananya	Pembenahan kawasan pemukiman kawasan wisata Carocok Painan dan kawasan Mandeh	Pengembangan desa-desa wisata dalam rangka penumbuhan sadar wisata dan peningkatan keterlibatan masyarakat	

No.	Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah	RPJM Ke-2 (2011-2015)	RPJM Ke-3 (2016-2020)	RPJM Ke - 4 (2021-2025)	Analisis
		Pembangunan Jalan: Alahan Panjang-Pasar Baru Bayang; Jalan Carocok Tarusan-Sungai Pinang-Teluk Kabung	Pembenahan kawasan Mandeh dan Jembatan akar	Pengembangan kawasan wisata Mandeh Rubiah, Sumedang dan wisata budaya	
		Terbangunnya pusat informasi wisata lengkap dengan fasilitas teknologi informasi	Terdapatnya kualitas prasarana dan sarana perhubungan menuju objek wisata	Terwujudnya peningkatan kualitas tenaga pemandu dan pengelola wisata	
<b>C.</b>	<b>Pembangunan Pendidikan dan Kesehatan dalam rangka menciptakan SDM berkualitas</b>				
1	Tercapainya Kualitas Pendidikan yang Tinggi dan Dilandasi Moral Agama	95 % guru berkompeten diseluruh jenjang pendidikan dan seluruh sekolah terakreditasi.	Penyelesaian manajemen eksternal Tercapainya target MDG pemerataan SMP 99%	Mengupayakan pencapaian mutu sekolah bertaraf internasional	Untuk mewujudkan tercapainya Kualitas Pendidikan yang Tinggi dan Dilandasi Moral Agama, apakah benar harus dengan target terwujudnya sekolah dan sistem pendidikan bertaraf internasional? Perlu kajian untuk mendukung pemikiran ini.
		Tersedia Lab ilmu dasar: matematika, fisika, kimia dan biologi dan guru tersedia	Kurikulum agama terintegrasi ke dalam semua mata pelajaran	Menyiapkan masyarakat untuk sistem pendidikan internasional	

No.	Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah	RPJM Ke-2 (2011-2015)	RPJM Ke-3 (2016-2020)	RPJM Ke - 4 (2021-2025)	Analisis
		Selesainya Fokus Sekolah kejuruan	Terwujudnya Sekolah Kejuruan standar nasional	Sekolah Kejuruan menghasilkan tamatan yang berdaya saing	
		Studi Kelayakan Pembangunan Perguruan Tinggi Negeri	Koordinasi dengan lembaga terkait dalam pembangunan Perguruan Tinggi Negeri	Menyiapkan berbagai infrastruktur pendukung	
		Rintisan 1 Sekolah Berasrama	Penumbuhan sekolah berstandar nasional disetiap kecamatan	Pemantapan 1 Sekolah berasrama dan 2 Standar Internasional	
2	Terwujudnya Derajat Kesehatan dan pelayanan kesehatan yang merata	Konsolidasi manajemen pelayanan kesehatan dasar	Penuntasan sebagian Penyakit utama	Konsolidasi manajemen pelayanan kesehatan Dasar	Tahap 4 merupakan pengulangan tahap 2 yang seharusnya sudah selesai
		Peningkatan pelayanan kesehatan di RSUD M. Zein Painan dan meningkatkan statusnya menjadi rumah sakit Tipe B Tersedianya	Meningkatnya Status Rumah Sakit Tapan dari Tipe D menjadi RS tipe C	RSUD M. Zein Painan menjadi salah satu rumah sakit rujukan di Sumatera Barat untuk perawatan kesehatan tertentu	

No.	Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah	RPJM Ke-2 (2011-2015)	RPJM Ke-3 (2016-2020)	RPJM Ke - 4 (2021-2025)	Analisis
		rumah sakit Tipe D di Tapan			
3	Terwujudnya Ketahanan Pangan dan Gizi	Peningkatan jumlah dan diversifikasi tanaman pangan guna meningkatkan derajat kesehatan serta gizi masyarakat	Meningkatkan produksi melalui teknologi tepat guna secara maksimal	Peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil pertanian tanaman pangan	Tahap 4, Peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil pertanian tanaman pangan adalah berorientasi ekonomi, bukan kepada ketahanan pangan dan gizi.
4	Terwujudnya Sistem Pendidikan yang Bersinergi dengan Dunia Usaha	Peningkatan infrastruktur pendidikan kejuruan yang berorientasi kepada dunia usaha	Mengoptimalkan fungsi balai latihan kerja dan penambahan balai latihan kerja di setiap kecamatan	Peningkatan kualitas tenaga edukasi dan tenaga non edukasi	
<b>D.</b>	<b>Mengembangkan Nilai-Nilai Agama, Budaya dan Adat Istiadat dalam Kehidupan Bermasyarakat</b>				
1	Terwujudnya Tata kehidupan beragama, adat Istiadat dan berbudaya	Terlaksananya pencerahan pemahaman agama dan adat kepada para tokoh dan	Terlaksananya pencerahan agama dan adat untuk mubaligh dan tokoh agama	Terlaksananya pencerahan agama dan adat untuk masyarakat umum	Tidak tampak perbedaan tahap 2, 3, dan 4.

No.	Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah	RPJM Ke-2 (2011-2015)	RPJM Ke-3 (2016-2020)	RPJM Ke - 4 (2021-2025)	Analisis
		pemuka masyarakat			
		Semakin lengkapnya jumlah sarana peribadatan	Semakin meningkatnya kualitas sarana peribadatan	Semakin meningkatnya kualitas sarana peribadatan	
2	Terwujudnya Masyarakat Berbudi Luhur dan Berakhlak Mulia	Meningkatkan kualitas pendidikan agama pada berbagai jalur, jenis dan jenjang pendidikan	Meningkatnya pemahaman terhadap nilai-nilai agama pada generasi muda	Meningkatnya pemahaman terhadap nilai-nilai agama pada generasi muda	Tahap 4 merupakan pengulangan tahap 3
		Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi masyarakat	Tahap 2, 3 dan 4 persis sama
3	Terwujudnya Kesalehan Sosial Beserta Kelembagaannya	Semakin optimalnya pengumpulan dan pemanfaatan, zakat, infak dan sadakah.	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kesalehan sosial	Terbangunnya wadah tunggal pengelola zakat, wakaf dan infak	Tahap 3 idealnya lebih dahulu untuk mewujudkan tahap 2.
		Terlaksananya penerapan sistem perbankan syariah	Semakin mantapnya penerapan sistem	Terlaksananya penerapan Sistem Ekonomi Islam	

No.	Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah	RPJM Ke-2 (2011-2015)	RPJM Ke-3 (2016-2020)	RPJM Ke - 4 (2021-2025)	Analisis
			perbankan syariah.		
4	Terwujudnya sistem pengelolaan tanah ulayat Dengan Kepastian Hukum	Terlaksananya inventarisasi dan konsolidasi pemilik ulayat	Terlaksananya kesepakatan KAN seluruh kabupaten dan kota tentang sistem pemanfaatan tanah ulayat	Terlaksananya pemanfaatan yang berlandaskan sistem yang telah diatur dalam Perda Tanah Ulayat	Tahap 2 tidak perlu mencakup kabupaten dan kota lain karena RPJP ini tidak mengatur kesepakatan antar kabupaten dan kota dan akan mengganggu kinerja pembangunan apabila tidak tercapai
		Terlaksananya pemetaan tanah ulayat berikut pemilikinya	Tersusunnya Perda Tanah Ulayat yang disepakati oleh KAN dan Lembaga Kerapatan Adat	Terlaksananya Pengamanan atas pemanfaatan tanah ulayat.	
<b>E.</b>	<b>Pengendalian Bencana dan Pelestarian Lingkungan Hidup secara Berkelanjutan</b>				
1	Terlaksananya Panataan Ruang Yang Baik dan Dilaksanakan Secara Konsekuen	Selesainya penyusunan RTRW Provinsi Sumbar serta kab dan kota lainnya	Terlaksananya penerapan dokumen RTRW secara tegas dan konsekuen	Semakin mantapnya penataan ruang wilayah	Tahap 2 tidak dapat dikontrol oleh kabupaten melalui RPJP ini, maka target tahap 3 dan 4 tidak mungkin tercapai sesuai yang direncanakan RPJP. Hal ini mengganggu kinerja pembangunan jangka panjang daerah.

No.	Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah	RPJM Ke-2 (2011-2015)	RPJM Ke-3 (2016-2020)	RPJM Ke - 4 (2021-2025)	Analisis
		Terlaksananya penyusunan Rencana Induk Sektoral sesuai prioritas pembangunan.	Selesainya Penyusunan Rencana Induk Sektoral sesuai daerah	Terlaksananya revisi terhadap RTRW yang telah berjalan separuh waktu.	
		Tersusunnya Rencana Zonasi Ruang Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Tersusunnya Rencana Zonasi Rinci Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Penerapan Rencana Zonasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dalam Pembangunan	
2	Terdapatnya Perlindungan Terhadap Kawasan Konsevasi Alam	Terlaksananya penetapan patok yang jelas serta inventarisasi lahan flora dan fauna serta lahan Kritis	Terwujudnya peningkatan perlindungan dan pengawasan terhadap Kawasan Konservasi Alam	Terdapatnya pengembangan flora dan fauna dalam Kawasan Konservasi	
		Terlaksananya penertiban penebangan hutan dan pemberdayaan masyarakat sekitar Kawasan Konservasi	Terwujudnya penetapan Perda sanksi keras bagi pelanggaran Kawasan Konservasi Alam	Meningkatnya populasi tanaman langka	Tahap 2 dan 3 satu ide yang sama

No.	Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah	RPJM Ke-2 (2011-2015)	RPJM Ke-3 (2016-2020)	RPJM Ke - 4 (2021-2025)	Analisis
3	Terlaksananya Tata Kelola Lingkungan Yang Baik	Terlaksananya pengembangan sarana dan manajemen lingkungan	Tersusunnya standar baku mutu air dan udara bagi industri	Terlaksananya pengawasan ketat terhadap pencemaran air dan udara oleh industri	
		Tersusunnya Perda lebih operasional untuk pengelolaan lingkungan hidup.	Terwujudnya pengawasan penggunaan lahan kritis	Terdapatnya pengawasan penggunaan lahan kritis	
4	Terbinanya Masyarakat Sadar Lingkungan	Berkembangnya pendidikan dan penyuluhan sadar lingkungan	Terlaksananya pendidikan dan penyuluhan sadar lingkungan	Terlaksananya pendidikan dan penyuluhan sadar lingkungan	
5	Terlaksananya Mitigasi dan Tanggap Darurat dalam menghadapi ancaman bencana	Pelaksanaan Mitigasi Bencana dan Pembangunan sarana dan prasarana pendukung, seperti : - jalur evakuasi - pemecah gelombang ( <i>breakwaġer</i> ) - <i>Shelġer</i> - dll	Pelaksanaan Mitigasi Bencana dan Pembangunan sarana dan prasarana pendukung, seperti : - jalur evakuasi - pemecah gelombang ( <i>breakwaġer</i> ) - <i>Shelġer</i> - dll	Pelaksanaan Mitigasi Bencana dan Pembangunan sarana dan prasarana pendukung, seperti : - jalur evakuasi - pemecah gelombang ( <i>breakwaġer</i> ) - <i>Shelġer</i> - dll	Tahapan pelaksanaan mitigasi bencana tentu tidak sama dari periode ke periode RPJMD, dapat ditingkatkan dengan metoda dan teknik mitigasi yang memperlihatkan peningkatan teknik mitigasi. Selain itu juga dapat ditargetkan dari sisi hasil implementasi mitigasi.

Sasaran dan arah Kebijakan untuk mewujudkan Misi tidak diurai dengan tegas dan rinci di dalam setiap tahapan RPJMD, sehingga pencapaian sasaran tidak pula dapat diukur dengan jelas. Namun untuk tetap dapat mengukur capaian RPJPD maka digunakan analisis terhadap target dan realisasi sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJPD 2005-2025 dengan sebelas indikator utama berikut.

- 1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) minimum 80;
- 2) Pendapatan perkapita sekitar US \$ 5.000 dengan Indeks Gini Ratio paling tinggi 0,25;
- 3) Terjadi transformasi mata pencaharian penduduk dari sektor primer ke sektor sekunder yang diikuti dengan meningkatnya kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kabupaten Pesisir Selatan yang mencapai 30%;
- 4) Lapangan kerja terbuka bagi generasi muda, sehingga angka pengangguran turun menjadi cukup rendah yakni 5 %;
- 5) Persentase penduduk miskin turun menjadi sangat rendah yakni 5,0 %;
- 6) Pasar Kecamatan tumbuh menjadi pasar semi modern. Khususnya Pasar Tapan, Pasar Kambang, dan Pasar Baru diarahkan menjadi pasar grosir yang mampu memenuhi berbagai kebutuhan jual beli secara langsung dengan konsumen maupun memenuhi kebutuhan barang eceran pasar kecamatan lainnya. Fungsi Kota Painan sebagai Pusat Kegiatan Lokal berkembang dg mantap
- 7) Tumbuh sebuah kota modern di Silaut yang dicikalbakali oleh KTM;
- 8) Ekonomi tumbuh secara lebih berkualitas dengan tingkat pertumbuhan di atas 7%, yang diikuti dengan distribusi pendapatan yang baik;
- 9) Kemungkinan Pesisir Selatan mekar menjadi dua Kabupaten. Kecamatan Tapan yang telah di Plot dalam RTRW sebagai kawasan Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp) akan menjadi pusat pertumbuhan baru di wilayah bagian selatan Provinsi Sumatera Barat dan Pesisir Selatan. Painan sebagai Ibukota Kabupaten semakin mantap fungsinya sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL);

- 10) Jalan Pasar Baru-Alahan Panjang selesai, Carocok-Mandeh, Sungai Pinang dan Sungai Pisang selesai, Jalan Lintas Barat Indera Pura-Muara Sakai-Kota Silaut terbuka, dan Jalan Kambang-Muaralabuh dirintis;
- 11) Beberapa objek wisata tumbuh menjadi wisata utama di Sumatera Barat.

Tabel 5 memperlihatkan hasil kinerja RPJP Pesisir Selatan 2005 – 2025.

Tabel 5. Evaluasi Hasil RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan 2005-2025

No	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Kondisi tahun 2005	Target tahun 2025	Target sasaran	Capaian	Tingkat capaian (%)	Target sasaran	Capaian	Tingkat capaian (%)	Target sasaran	Capaian	Tingkat capaian (%)	Target sasaran	Capaian	Tingkat capaian (%)	Rasio capaian akhir RPJPD
					RPJMD1			RPJMD2 (2011-2015)			RPJMD 3 (2016-2020)			RPJMD 4 (2021-2026)			
1		Indek Pembangunan Manusia (IPM)		>80				74,6			76,45			78,6			
2		Pendapatan perkapita		US \$ 5.000				17,278 juta			30,079, - juta			52,362 juta			
3		Indek Gini Ratio		<0,25													
4		Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB		30%				22,5%			28.5%			31,5%			
5		angka pengangguran		5%													
6		Persentase		5,0%													

No	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Kondisi tahun 2005	Target tahun 2025	Target sasaran	Capaian	Tingkat capaian (%)	Target sasaran	Capaian	Tingkat capaian (%)	Target sasaran	Capaian	Tingkat capaian (%)	Target sasaran	Capaian	Tingkat capaian (%)	Rasio capaian akhir RPJPD
					RPJMD1			RPJMD2 (2011-2015)			RPJMD 3 (2016-2020)			RPJMD 4 (2021-2026)			
		penduduk miskin															
7		Pasar modern Kecamatan		Pasar Tapan, Pasar Kambang, dan Pasar Baru													
8		Pusat Kegiatan Lokal (Painan)		manta p													
9		Kota modern		Silaut yang dicikal bakali oleh KTM													
10		pertumbuhan ekonomi		>7%				6,75%			7%			7,2%			
11		Pemukaran		Pusat Kegiatan													

No	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Kondisi tahun 2005	Target tahun 2025	Target sasaran	Capaian	Tingkat capaian (%)	Target sasaran	Capaian	Tingkat capaian (%)	Target sasaran	Capaian	Tingkat capaian (%)	Target sasaran	Capaian	Tingkat capaian (%)	Rasio capaian akhir RPJPD
					RPJMD1			RPJMD2 (2011-2015)			RPJMD 3 (2016-2020)			RPJMD 4 (2021-2026)			
		Kabupaten		Wilayah (PKWp) Kecamatan Tapan													
				Painan (PKL)													
Tidak dicantumkan sebagai indikator RPJP tetapi dicantumkan dalam penjelasan tahapan RPJM																	
1		Umur harapan hidup						68,42 tahun			68,42 tahun			70,38 tahun			
2		Rata2 lama sekolah						9,45 tahun			10,4 tahun			11,02 tahun			
3		RSUD M. Zein						Tipe B									
4				Rumah sakit di Tapan				RSUD Tipe D			RSUD Tipe C						
5				Kebutuhan										100%			

No	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Kondisi tahun 2005	Target tahun 2025	Target sasaran	Capaian	Tingkat capaian (%)	Target sasaran	Capaian	Tingkat capaian (%)	Target sasaran	Capaian	Tingkat capaian (%)	Target sasaran	Capaian	Tingkat capaian (%)	Rasio capaian akhir RPJPD
					RPJMD1			RPJMD2 (2011-2015)			RPJMD 3 (2016-2020)			RPJMD 4 (2021-2026)			
				energi terpenuhi													

Dengan ratio capaian yang demikian, maka predikat kinerja RPJP 2005-2025 Kabupaten pesisir Selatan tergolong kategori yang belum dapat ditentukan. Permasalahan yang ditemukan dalam menjalankan RPJP melalui RPJMD sebelumnya, terutama RPJMD tahap ke empat adalah data yang kurang lengkap untuk menunjukkan capaian. Selain itu, kinerja untuk Kota modern dan Pemekaran Kabupaten tidak ditunjukkan dengan data pendukung capaian realisasi.

Tabel 6 memperlihatkan hasil evaluasi RPJP kabupaten Pesisir Selatan 2005-2025 dengan penjelasan dan rekomendasi untuk perbaikan penyusunan RPJP masa yang datang.

Tabel 6. Hasil Evaluasi terhadap RPJP Kabupaten Pesisir Selatan 2005-2025

No	Jenis Kegiatan	Hasil Evaluasi			
		Kesesuaian		Penyebab ketidaksesuaian	Rekomendasi untuk RPJP yang akan datang
		Sesuai	Tidak sesuai		
1	Kebutuhan dan ketersediaan data dan informasi		v		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu peningkatan efektifitas pengolahan informasi dan data perencanaan pembangunan daerah berbasis data SIPD, terutama validasi dan reliabilitas data. Hal ini penting karena terkait dengan pengukuran target dan realisasi indikator kinerja utama dan indikator kunci pembangunan daerah.</li> <li>- Sumber data antara lain dapat berupa data primer yang diperoleh dari kegiatan penelitian, monitoring dan evaluasi, atau kegiatan sejenis lainnya yang dilaksanakan secara periodik oleh Perangkat Daerah secara berkesinambungan. Selain itu juga dapat digunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) pusat maupun daerah dan instansi pemerintah, hasil</li> </ul>

					riset/audit/studi oleh lembaga yang kompeten dibidangnya
2	Kesesuaian RPJP dengan arahan RTRW Kabupaten Pesisir Selatan		v		
3	Deskripsi dan Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah berbasis data		v		
4	Perumusan Masalah Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan berbasis data dan informasi gambaran umum		v		
5	Analisis Isu Strategis Kabupaten Pesisir Selatan berbasis rumusan masalah		v		
6	Kesesuaian dengan RPJP Nasional (visi, misi, arah dan tahapan serta prioritas pembangunan jangka panjang nasional)				
7	Kesesuaian dengan RPJPD Provinsi Sumatera Barat (visi, misi, arah dan tahapan serta prioritas				

	pembangunan jangka panjang provinsi Sumatera Barat)				
8	Perumusan Visi dan Misi Kabupaten Pesisir Selatan berbasis Isu Strategis				
9	Perumusan arah kebijakan berbasis Misi dan Strategi		v		Perlu arah kebijakan yang fokus pada aspek daya saing daerah antara lain dari aspek kemampuan ekonomi daerah, fasilitas atau infrastruktur wilayah yang mendukung untuk kehidupan sehat dan sejahtera, iklim investasi, dan yang paling penting adalah kualitas sumber daya manusia. Artinya daya saing bukan hanya dari kriteria fisik saja, tetapi sangat ditentukan oleh kinerja sumberdaya manusia melalui produktivitas kerja yang makin meningkat

## V. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan rekomendasi yang disampaikan di atas dalam rangka evaluasi Rencana Pembangunan Jangka panjang 2005 -2025 Kabupaten Pesisir Selatan, diharapkan hasil evaluasi ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam menyusun rencana pembangunan jangka panjang dua puluh tahun kedepan. Permasalahan utama yang ditemukan adalah rencana yang diusulkan belum didukung data yang valid dengan sumber data yang dipercaya. Sementara, dukungan data dan informasi terkini yang dipercaya akan membantu daerah menyusun dan menetapkan arah kebijakan dan sasaran pokok yang lebih tepat, sehingga dapat digunakan untuk membagi periode pencapaiannya dalam pembangunan lima tahunan. Hal itu juga akan dapat membantu penetapan indikator dan target kinerja yang lebih baik.

Indikator pembangunan jangka panjang juga perlu dibangun karena akan sangat menentukan dalam mengukur keberhasilan pembangunan jangka panjang. Untuk itu, sangatlah penting menyediakan data yang mudah terjangkau dengan metoda pengumpulan data yang relevan, sehingga diperoleh data yang valid dan representatif untuk keseluruhan kinerja pembangunan yang diharapkan.

Diharapkan dengan selesainya dokumen ini, penyusunan rencana pembangunan jangka panjang dua puluh tahun kedepan akan menjadi lebih baik dan terencana dengan matang. Hal – hal yang belum terakomodasi dalam laporan ini tentu memberi kesempatan untuk kembali membuka diskusi dan melanjutkan analisis, karena perencanaan memang tidak seharusnya berhenti ketika dokumennya selesai. Semoga bermanfaat untk kebaikan bersama.



**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**